



**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI I DPR RI**

**KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR FILM (LSF), BADAN KEAMANAN LAUT RI, DAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA (BSSN)**

---

Rapat ke : 5 (lima)  
Tahun Sidang : 2017-2018  
Masa Persidangan : IV  
Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI dengan Dirut PT. Telkomsel, Dirut PT. Indosat, dan Dirut PT. XL Axiata  
Hari, Tanggal : Senin, 19 Maret 2018  
Pukul : 12.00 WIB (didahului makan siang)  
Sifat Rapat : Terbuka  
Pimpinan Rapat : Meutya Viada Hafid, Wakil Ketua Komisi I DPR RI  
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P. M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1  
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270  
Acara : Registrasi dan pengamanan data konsumen  
Hadir : 1. ... orang dari 49 Anggota Komisi I DPR RI  
2. a. Menkominfo, Rudiantara;  
b. Dirut PT. Telkomsel; Ririek Ardiansyah  
c. Dirut PT. Indosat; Joy Wahyudi  
d. Dirut PT. XL Axiata diwakili oleh Direktur Independen PT. XL Axiata, Yessie D. Yosetya beserta jajaran.

## **I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 13.40 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo dan RDPU Komisi I DPR RI dengan Dirut PT. Telkomsel, Dirut PT. Indosat, dan Dirut PT. XL Axiata pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid.

## **II. KESIMPULAN**

1. Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terkait proses registrasi kartu prabayar sehingga tidak ada pihak yang dapat melakukan penyalahgunaan data pribadi pelanggan.
2. Komisi I DPR RI mendesak Kemkominfo untuk menata sistem pertanggungjawaban pengamanan data pelanggan yang dikelola oleh operator telekomunikasi sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga negara.
3. Dalam rangka memastikan negara melindungi data pribadi pelanggan, Komisi I DPR RI akan membentuk Panja Perlindungan Data Pelanggan Seluler dan pembentukannya akan ditetapkan dalam Rapat Intern Komisi I DPR RI.
4. Komisi I DPR RI mendesak Menkominfo untuk melakukan rekonsiliasi data pelanggan seluler dan operator telekomunikasi untuk memberitahukan kepada masyarakat terkait informasi penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) yang digunakannya pada proses registrasi nomor seluler kartu prabayar.
5. Komisi I DPR RI mendesak Kemkominfo untuk mengoptimalkan sosialisasi secara lebih intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga data pribadi dan tidak memberikannya kepada pihak yang tidak berhak.

### **Catatan:**

Guna mendalami sistem pengamanan data pelanggan, Komisi I DPR RI akan menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemkominfo dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

III. **PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 17.47 WIB.

Jakarta, 19 Maret 2018  
**KETUA RAPAT,**

**TTD.**

**MEUTYA VIADA HAFID**  
**A-340**